

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN

KENDAL

Oleh :

Wisnu Pradipta, Dewi Rostyaningsih, Aloysius Rengga

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

Email: pradiptawishnu@gmail.com

ABSTRACT

In the framework of the intellectual life of the nation, as mandated in the preamble of the Indonesia Constitution on 1945 in the fourth paragraph. The Government of the Province of Central Java has published Regulations about a Arrangement the Library, that is an activity planning, management, preservation, development, coaching and supervision of the Library. The policy was formulated to solved existing problems one of them a low interest of reading society. The purpose of the research was to find out how the Implementation of the Arrangement the Library in the District of Kendal and to know of factors support and obstacle of implementation. The method used in this research was qualitative-descriptive.

Based on the results of research in the Office of Library and Regional Archives in The District Of Kendal as the main executor of Kendal government in the sector of library. That the Implementation policy of Arrangement the Library in the District of Kendal on 2014 have not been implemented maximally. Because there are still some targets achievement RPJMD library sector at Kendal in 2010-2015 has not been reached. Target performance indicators on the RPJMD yet achieved one of them is the level of library visitors. In the implementation of this policy there are still obstacles such as communications that has not been going well, limited human resources, facilities and infrastructures supporting the Library is still limited.

The result of this research can be concluded that the implementation of arrangement the library in the Districtof Kendal in 2014 has not been implemented maximally. Suggestion from researcher is the Office of Library and the archive area of Kendal as implementers are expected to further improves communication in socialization of the Library and the interests of reading to the general public. Then the addition of budget to the section of Library for the procurement of non-permanent employees (npe) to fill a shortage of librarians and Library technical personnel, as well as improving infrastructure facilities of the Library.

Keywords: Implementation, Library and factors of obstacle

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 pada alinea keempat, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Bahwa Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Dasar hukum Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan. Dalam Pasal 4 pada Perda ini Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan

- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya ditinjau dari konsep budaya pelayanan prima dari faktor tindakan dan perhatian masih kurang optimal, masih ditemukan pelayanan perpustakaan belum bisa cepat dan akurat kepada masyarakat sedangkan dari petugas perpustakaan telah berusaha secara maksimal dalam memberikan pelayanan. Tetapi dalam pelaksanaan tidak semua perpustakaan desa atau masyarakat mendapatkan pembinaan, sosialisasi dan bantuan perpustakaan. Dalam pelaksanaannya diketahui bahwa dalam beberapa tahun ini telah terjadi penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Minat baca masyarakat di Kabupaten Kendal nampaknya masih rendah. Diketahui bahwa kegiatan perpustakaan dan layanan perpustakaan umum maupun keliling belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini berkaitan dengan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat. berdasarkan uraian diatas, bahwa masih terdapat permasalahan yang mempengaruhi dalam implementasi penyelenggaraan perpustakaan di kabupaten kendal

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kendal.

C. Teori

1. Administrasi publik

Chandler dan Plano (dalam Keenan 2008:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Beberapa pengertian Administrasi Publik menurut para ahli (dalam Keenan 2008:5-6):

- 1) Menurut Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen.
- 2) Barton & Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Starling melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan.
- 4) Nigro & Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Rosenbloom memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam

rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dengan adanya pergeseran makna “publik”, maka ilmu administrasi publik telah menemukan lokusnya secara lebih jelas. Intinya, semua aktivitas yang terjadi pada birokrasi pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintah menjadi bidang perhatian ilmuwan administrasi publik. Apabila lokus ilmu administrasi publik menjadi semakin jelas, munculnya studi kebijakan publik sebagai pokok perhatian ilmuwan administrasi publik. Hal ini merupakan implikasi yang sangat logis karena kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah (Dwiyanto, 2007).

Dari definisi para ahli di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih atau lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan (meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan), dengan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang menghasilkan keputusan-keputusan berupa kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Ia juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak

berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah(dalam pasolong, 2008:39).

Thomas R. Dye memberikan definisi tentang “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah (Winarno, 2008:17).

Dari definisi kebijakan publik diatas, penulis dapat merangkum kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah, dengan menimbang pilihan-pilihan yang ada, sumber daya dan permasalahan. Untuk memecahkan permasalahan di masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa, yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan publik merupakan hasil atau output dari pemerintah. Akan tetapi jika hasil yang berupa keputusan kebijakan tersebut tidak diimplementasikan, maka tidak ada manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Pada posisi seperti ini Implementasi kebijakan sangat dibutuhkan, karena merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan diinginkan. Sehingga sebuah kebijakan dikatakan berhasil atau gagal, dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan tersebut yang dilaksanakan dengan baik atau tidak.

3. Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah

undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata(*tangible output*) (Subarsono,2007:145).

Menurut Goggin (1990), implementasi generasi pertama dapat diamati dari karya Pressman dan Wildavsky (1973), yang melihat implementasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang sangat bersifat *top-down* dimana penilaiannya ditentukan dari seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan. Generasi kedua, merupakan reaksi terhadap kelemahan generasi pertama, yang bersifat *bottom-up* dimana eksistensi jaringan kerja para aktor, termasuk tujuan, strategi dan aksi mereka ikut diperhitungkan. Dengan kata lain, telah dikatakan oleh Linder dan Peters (1986), desain program/kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut para implementor, karena itu adaptasi dan diskresi dalam implementasi seharusnya dilihat sebagai suatu yang seharusnya diinginkan. Implementasi generasi ketiga, pusat perhatian diarahkan pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan serta implementasinya pada pelaksanaan dan keberhasilannya Goggin (1990) (dalam pasolong, 2008:59).

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) dengan prosedur atau teknik tertentu. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan implementasi Undang-undang tentang Perpustakaan seperti yang telah diuraikan di atas maka diperlukan proses implementasi yang efektif dan efisien sesuai dengan regulasi apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (dalam Nugroho, 2011: 650-652) yaitu:

1. Ketepatan kebijakan
 - a. Sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
 - b. Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan.
 - c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai karakter kebijakan.
2. Ketepatan pelaksana

Terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang memiliki derajat politik keamanan yang tinggi sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat seperti pembangunan berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.
3. Ketepatan target
 - a. Apakah target sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain.
 - b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi oleh kebijakan atau tidak, dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak kebijakan.

- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan lingkungan
 - a. Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Callista (dalam Nugroho, 2011: 651-652) menyebut sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
 - b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista (dalam Nugroho, 2011: 652) sebagai variabel eksogen, yaitu *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interperative institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan proses
Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses yaitu (dalam Nugroho, 2011: 652)
- Policy acceptance.* Publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
 - Policy adoption.* Publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan. Di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
 - Strategic readiness.* Publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat *on the street* (birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Meter dan Horn adalah sebagai berikut:

- Standar dan Sasaran Kebijakan**
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga bisa diwujudkan dalam tindakan nyata.
- Sumberdaya**
Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.
- Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan**
Kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi

- dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
- Karakteristik Badan Pelaksana**
Yang dimaksud dengan karakteristik badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
 - Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**
Faktor ini mencakup berbagai hal, yaitu sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yaitu mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik di sekitar lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
 - Disposisi Pelaksana**
Disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yaitu:
 - Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan
 - Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mendiskripsikan implementasi dan permasalahan dalam kebijakan

penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kendal.

2. Situs Penelitian

Pada penelitian ini wilayah yang diambil dalam penelitian adalah Kabupaten Kendal.

3. Subjek Penelitian

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal. Kemudian staff bidang perpustakaan dan pengunjung perpustakaan.

4. Jenis Data

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

5. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara, dan observasi. Data sekunder merupakan data yang berasal dari catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

7. Analisis interpretasi data

Teknik Analisis Komponensial digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Unsur-unsur atau elemen-elemen yang kontras akan dipilah oleh peneliti dan selanjutnya akan dicari term-term yang dapat mewadahnya.

Teknik ini baru layak dilakukan kalau seluruh kegiatan observasi dan wawancara yang berulang-ulang telah memperoleh hasil maksimum sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini kegiatan analisis dalam teknik Analisis Komponensial dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

1. Penggelaran Hasil Observasi dan Wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan berkali-kali, digelarkan pada lembaran-lembaran yang mudah dibaca. Data-data tersebut pada tahap ini tidak perlu dikelompokkan sesuai dengan domain dan atau sub-domain yang telah dipilih, yang penting bahwa hasil-hasil observasi dan wawancara dapat dibaca dengan mudah. Dari data-data pada tahap ini sesungguhnya peneliti telah dapat melakukan editing terbatas pada tahap tersebut.

2. Pemilihan Hasil Observasi dan Wawancara

Penelitian selanjutnya melakukan pemilihan terhadap hasil wawancara. Artinya, hasil wawancara tersebut dipilah menurut domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal.

3. Menemukan Elemen-elemen Kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilihan sub-

domain yang telah ditemukan elemen kontras (Bungin, 2009: 211).

Interpretasi data adalah upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.

8. Kualitas data

Hal ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (dalam Sugiyono, 2009: 241). Kemudian penulis memilih melakukan triangulasi teknik pada saat melakukan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kendal:

1. Ketepatan Kebijakan

Dalam Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Kendal untuk perumusan kebijakan ini sebelum disahkan dan diterbitkan telah melalui berbagai kajian yang mendalam dengan menyesuaikan permasalahan dan peraturan yang sudah ada. Kemudian telah melibatkan lembaga yang terkait dan akuntabel dibidang perpustakaan. Adanya faktor pendukung implementasi yaitu Standar dan sasaran kebijakan dan disposisi pelaksana.

Penyelenggaraan Perpustakaan mencakup kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan, yang telah diterapkan oleh pelaksana guna untuk memecahkan permasalahan di bidang perpustakaan. Namun pelaksanaan kebijakan ini masih belum maksimal karena terdapat

kendala dilapangan. Adanya faktor penghambat implementasi yaitu sumberdaya dan Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan.

2. Ketepatan pelaksana

Aktor utama dalam Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Kendal yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang sesuai dengan tupoksinya yaitu pada seksi perpustakaan. Adanya faktor pendukung implementasi yaitu Disposisi Pelaksana. Untuk Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan masih belum optimal. Faktor penghambat yaitu Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan.

3. Ketepatan Target

Pada Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Kendal telah belum sesuai target. Dilihat dari realisasi capaian program kegiatan di RKPd dibidang perpustakaan telah tercapai. Namun, hal tersebut untuk pencapaian dari target RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2014 belum tercapai seluruhnya. Adanya faktor penghambat implementasi yaitu sumberdaya dan Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan dalam implementasi kebijakan ini.

Kondisi target yang meliputi masyarakat dan pengelola perpustakaan desa maupun masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kendal telah tepat. Dilihat dari masyarakat sangat mendukung adanya kebijakan ini. Tidak adanya tumpang tindih kebijakan yang dapat dilihat dari tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adanya faktor pendukung implementasi yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik.

4. Ketepatan Lingkungan

Pada Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal, fenomena lingkungan dilihat dari lingkungan internal telah tepat. Adanya interaksi antara pemerintah provinsi sebagai perumus kebijakan dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal dalam bentuk koordinasi yang baik. Komposisi jejaring organisasi yang terlibat dalam kebijakan ini terdiri dari dinas pendidikan, dinas sosial, pemerintah kabupaten dan kecamatan atau desa mendukung kebijakan ini dengan baik. Adanya faktor pendukung yaitu Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan.

Sedangkan untuk lingkungan eksternal, masyarakat sebagian besar mendukung kebijakan ini, akan tetapi juga terdapat yang tidak mendukung dan belum seluruhnya lembaga strategis masyarakat dalam menginterpretasikan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan. Adanya faktor penghambat implementasi yaitu sumberdaya dan Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan.

5. Ketepatan Proses

Dalam Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal, fenomena ketepatan proses dilihat dari kesiapan pelaksana telah tepat, pelaksana telah mempersiapkan segala hal dari segi personil dan fasilitas penyelenggaraan perpustakaan secara baik. Adanya faktor pendukung implementasi yaitu karakteristik badan pelaksana, Disposisi Pelaksana dan sumberdaya.

Untuk pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini sangat baik, masyarakat disini puas terhadap kinerja dari pelaksana dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Adanya faktor

pendukung implementasi yaitu Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal telah berjalan cukup baik, walaupun masih ada kendala dalam implementasinya. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1.1 Ketepatan Kebijakan

Kebijakan ini telah dirumuskan berdasarkan permasalahan di bidang perpustakaan oleh Lembaga yang berwenang di bidang perpustakaan. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal dinilai mampu untuk memecahkan permasalahan di bidang perpustakaan, tetapi masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu perbaikan diberbagai sektor.

1.2 Ketepatan Pelaksana

Aktor utama pelaksana kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal dilaksanakan telah tepat yaitu pada Seksi Perpustakaan dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan tugas pokoknya dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pengolahan bahan pustaka.

Keterlibatan peran dari swasta dan masyarakat dalam kebijakan ini belum maksimal. Bentuk kegiatan dari keterlibatan masyarakat dan swasta berupa pengelolaan perpustakaan masyarakat atau swasta yang jumlahnya terbatas dan adanya bantuan dari swasta kepada perpustakaan desa maupun

masyarakat melalui CSR (Corporate Social Responsibility) belum tepat sasaran.

1.3 Ketepatan Target

Pencapaian Target kebijakan di bidang perpustakaan dilihat dari RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2014 belum tepat. Karena masih terdapat beberapa indikator yang pencapaian realisasinya belum sesuai target. Sedangkan kondisi target kebijakan terdiri atas masyarakat dan pengelola perpustakaan desa atau masyarakat dinilai tepat. Hal itu ditunjukkan dengan target kebijakan yang menerima dan mendukung kebijakan ini

1.4 Ketepatan Lingkungan

Lingkungan internal kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pelaksana daerah yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal bekerjasama dengan instansi lainnya dinilai tepat. Karena terdapat hubungan interaksi yang baik dan saling mempengaruhi dalam pelaksana kebijakan tersebut.

Lingkungan eksternal kebijakan ini dikatakan belum tepat. Karena dilihat dari peran lembaga strategis dalam masyarakat seperti radio, tokoh masyarakat, LSM atau kelompok-kelompok masyarakat dalam menginterpretasikan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kendal belum optimal, walaupun persepsi publik atas pelaksanaan kebijakan ini sebagian besar masyarakat mendukung secara positif dan terdapat sebagian masyarakat yang kurang mendukung kebijakan ini.

1.5 Ketepatan Proses

Kesiapan agen pelaksana dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal dalam implementasi penyelenggaraan perpustakaan telah siap

semua, baik kesiapan pembiayaan kegiatan maupun fasilitas sarana prasarana dan kesiapan tenaga perpustakaan juga sudah siap. Kenyataan terbatasnya jumlah tenaga perpustakaan yang dimiliki, tidak menghambat proses pelaksanaan program kegiatan karena adanya komitmen yang kuat dan respon yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pelaksana tetap berusaha menjalankan kegiatan dengan maksimal.

Kesiapan masyarakat dalam memahami, menerima, dan siap menjadi pelaksana kebijakan ini ada yang siap dan ada yang belum siap. Ketersediaan informasi tentang kebijakan ini sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat agar tahu dan siap untuk ikut serta menjadi bagian dari kebijakan ini. Untuk usia sekolah sangat siap terhadap kebijakan, sedangkan bagi orang dewasa juga turut mendukung kebijakan ini.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari faktor pendorong serta faktor penghambat, yaitu:

- a. Faktor pendukung Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal dapat disimpulkan yaitu adanya faktor standar dan sasaran kebijakan yang baik dan jelas karena telah mengatur segala bentuk kegiatan di bidang perpustakaan. Faktor pendukung selanjutnya yaitu faktor Karakteristik Badan Pelaksana, disini terdapat struktur birokrasi dan pola-pola hubungan yang terdapat di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal dinilai dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan serta program kegiatan yang ada. Faktor pendukung selanjutnya faktor Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan ini. Masyarakat sebagian besar mendukung terhadap kebijakan ini karena mereka menyadari bahwa keberadaan perpustakaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Faktor pendukung lainnya adalah Disposisi Pelaksana, Pelaksana memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dan didukung respon yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini.

- b. Faktor penghambat dalam implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal dapat disimpulkan yaitu antara lain kurangnya ketersediaan anggaran, jumlah tenaga di bidang perpustakaan dan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal, sehingga pelaksanaan program kegiatan termasuk layanan perpustakaan menjadi kurang maksimal untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada. Faktor penghambat lainnya adalah faktor Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan, komunikasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tentang perpustakaan dan minat baca oleh pelaksana belum maksimal, hanya berupa layanan perpustakaan keliling, seminar, workshop dan pameran buku yang keberadaannya masih terbatas. Pelaksana cenderung lebih aktif berkomunikasi dengan pihak atau instansi lain, tetapi pihak lain kurang merespons apa yang dikomunikasikan oleh pelaksana. Sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana masih belum tersampaikan secara menyeluruh

mengenai informasi penyelenggaraan perpustakaan kepada masyarakat maupun pihak lain, karena adanya keterbatasan kemampuan dalam mengkomunikasikan. Dan kurangnya keterlibatan organisasi lain, LSM, media massa dan tokoh masyarakat ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan ini. Sehingga target kebijakan yaitu masyarakat dan pengelola perpustakaan desa atau masyarakat masih ada yang kurang mengetahui bahkan tidak tahu tentang penyelenggaraan perpustakaan di daerahnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu terkait Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kendal ditinjau dari ketepatan kebijakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal segera menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan perpustakaan tersebut dengan menerbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kemudian keterlibatan swasta dapat ditingkatkan dengan cara melakukan kerjasama dan koordinasi secara rutin. Mendorong organisasi masyarakat dalam kegiatan promosi perpustakaan seperti karang taruna dan pkk dalam mensosialisasikan tentang perpustakaan dan budaya minat baca. Dalam pencapaian target RPJMD dibutuhkan peran aktif dari semua pihak dalam memperbaiki hambatan-hambatan yang terkait dalam pencapaian tujuan kebijakan. Meningkatkan kerjasama dengan media massa seperti buletin, atau surat kabar untuk membuat iklan tentang perpustakaan dan minat baca. Organisasi masyarakat, LSM dan tokoh masyarakat didorong untuk lebih aktif berperan serta dalam mensosialisasikan kebijakan ini

karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di daerahnya.

Saran berkaitan dengan faktor penghambat yaitu faktor Sumberdaya, adanya penambahan anggaran bagi seksi perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal. Dengan penambahan anggaran, diharapkan pelaksana dapat mengupayakan pengadaan pegawai tidak tetap (ptt) untuk mengisi kekurangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Kemudian diharapkan mampu meningkatkan fasilitas sarana prasarana perpustakaan, seperti koleksi buku yang belum lengkap serta jumlahnya terbatas. Saran untuk faktor penghambat lainnya yaitu faktor Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan, bentuk komunikasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana masih kurang tersampaikan dengan baik. Diperlukan peningkatan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara meningkatkan dalam hal jumlah kegiatannya dan dilakukan secara rutin. Terutama proses penyampaian informasi dalam sosialisasi perlu mempertimbangkan kondisi dilapangan agar apa yang disosialisasikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat maupun pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adya Brata, Atep. (2004). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Burhan, Bungin. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- J. Moleong M.A, Prof. Dr. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- NS, Sutarno. (2008). *Membina Perpustakaan Desa*. Jakarta: Sagung Seto.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy (edisi ketiga)*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyan Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Singaribun, Masri. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto (Ed). (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subarsono. AG (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif .Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Lain-lain:

Badan Pusat statistik Kabupaten Semarang Tahun 2013

Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2014

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014

Laporan Kinerja Instansi pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014

Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015 Revisi

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Internet:

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-ruu-tahun-2010/40-harmonisasi-ruu/2086-rpp-tentang-pelaksanaan-uu-no43-2007-tentang-perpustakaan.html>

diakses pada tanggal 23 Nopember 2014

<http://digilib.uin-suka.ac.id/5892/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

diakses pada tanggal 23 Nopember 2014

Marwiyah, Siti. 2011. Pengaruh Ketersediaan Koleksi Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa Di Perpustakaan Sma Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

diunduh pada tanggal 16 Nopember 2014